

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Arab Saudi merupakan negara yang berbentuk Monarki Absolut, dimana raja memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Dikutip dari infografis yang dihadirkan oleh suatu situs yang menyajikan informasi terkait negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, Arab Saudi memiliki badan legislatif yang disebut Majelis Syuro dan anggotanya merupakan orang-orang berpengaruh dari latar belakang yang berbeda-beda; sosial, politik, dan keagamaan (Fanack, 2020). Tugas dari Majelis Syuro ini adalah menasihati raja terkait program dan kebijakan di Arab Saudi. Meskipun anggota dari Majelis Syuro ini dapat menilai dan memperbaiki undang-undang pemerintah, tetapi tetap saja mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perubahan. Sedangkan pada badan eksekutif beranggotakan raja sebagai perdana menteri dari Arab Saudi dan dewan menteri-menteri yang dilantik oleh raja dan sebagian besar anggotanya berasal dari keluarga kerajaan. Arab Saudi merupakan negara yang mengikuti syariat Islam dengan bersumber dari Kitab Suci Al-Quran & Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang selama ini menjadi dasar konstitusi negara dan tidak pernah berubah. Maka dari itu, Arab Saudi merupakan negara yang sangat tertutup akan perubahan-perubahan terutama terhadap negaranya sendiri. Salah satunya ditandai dengan dibatasinya hiburan bagi masyarakat, seperti bioskop dan konser-konser musik di negara tersebut.

Hingga pada masa Raja Abdullah, sebelum diangkatnya Raja Salman, pemerintahan Arab Saudi masih enggan akan adanya perubahan. Pemerintahan pada masa ini bahkan menjauhi poros Turki dan Qatar yang dianggap pro terhadap perubahan. Tetapi setelah naiknya Raja Salman sebagai raja dan kemudian Pangeran Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota, banyak kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang kemudian dirubah secara drastis dikarenakan

adanya keinginan dari Pangeran Mohammed bin Salman untuk melakukan perubahan dengan upaya liberalisasi.

Beberapa peraturan kemudian diberikan banyak kelonggaran, terutama kepada wisatawan wanita yang datang ke Arab Saudi. Pemerintahan negara ini sendiri berharap bahwa *tourism* di Arab Saudi dapat menyumbang 10% untuk GDP negara mereka sampai dengan tahun 2030, yang saat ini masih ada di angka 3%. Hal ini disesuaikan dengan Saudi Vision 2030 yang merupakan rencana dari Pangeran Mohammed bin Salman dalam menciptakan Arab Saudi yang lebih terbuka (Arab News, 2019).

Saudi Vision 2030 merupakan *framework* strategi untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, serta mengembangkan sektor-sektor lain seperti kesehatan, edukasi, sampai dengan pariwisata. Dikutip dari website resmi Saudi Vision 2030 ([vision2030.gov.sa/en](http://vision2030.gov.sa/en)), tercantum beberapa tujuan dalam strategi ini yang salah satunya adalah *a thriving economy*. Pangeran Mohammed bin Salman mulai membuka peluang bisnis secara global dengan menggali potensi yang dimiliki oleh Arab Saudi. Hal ini menjadi salah satu tujuannya agar Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada penghasilan yang sebagian besar didapatkan dari produksi minyak. Dalam suatu data yang dihadirkan oleh World Bank, dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Arab Saudi melambat menjadi 1,7% pada 2019. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi sedangkan produksi minyak harus dikurangi karena adanya tekanan dari OPEC. Selain itu, serangan terhadap fasilitas Aramco yang terjadi pada 14 September di tahun yang sama juga mengakibatkan pemangkasan produksi sebesar 5,7 juta barel per hari atau mencapai 50% dari total produksi harian (CNN Indonesia, 2019).

Salah satu proyek besar dalam Saudi Vision 2030 ini adalah dibangunnya Qiddiya, tempat wisata bertemakan seperti *Six Flags* yang berlokasi di Amerika Serikat. Qiddiya ini disebut-sebut sebagai “*the Kingdom’s capital of entertainment, sports, and the arts*” yang akan memberikan budaya dan ‘sisi lain’ dari Arab Saudi dengan standar global. Pemerintah Arab Saudi bekerjasama dengan Bjarke Ingels Group (BIG), yaitu desainer dan arsitek yang berbasis di New York dan sampai saat

ini masih membuka peluang terhadap investor asing dalam proyek besarnya tersebut (Architect, 2019).

Selain membuka peluang-peluang kerjasama ini, Pangeran Mohammed bin Salman juga memperkuat perekonomian mereka dengan membangun bioskop komersial pertama di Arab Saudi. Hampir 35 tahun pelarangan tentang adanya bioskop muncul Arab Saudi. Namun setelah Pangeran Muhammed bin Salman berupaya untuk melakukan perubahan, ia akhirnya berhasil mengundang AMC, perusahaan bioskop terbesar di Amerika Serikat, sebagai investor di Arab Saudi. Dengan menayangkan film *Black Panther*, pembukaan bioskop pertama di Arab Saudi ini dihadiri oleh pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, serta kalangan pengusaha (BBC News, 2018). Penayangan film bioskop ini juga sudah tidak memisahkan antara penonton laki-laki dan perempuan. Hal ini termasuk kedalam langkah Pangeran Muhammed bin Salman sebagai upaya pembaruan ekonomi dan sosial yang terkait Saudi Vision 2030.

Sejak September 2019 kemarin, Arab Saudi sudah mulai ‘membuka’ negaranya lebih lebar lagi terutama kepada banyak wisatawan asing. Hal ini didukung dengan diperbolehkannya pembuatan visa dengan tujuan wisata dan dibukanya *visa on arrival* kepada 49 negara, termasuk Korea Selatan, Amerika, dan Inggris. 10 hari setelah berlangsungnya hal tersebut, terhitung 24.000 wisatawan masuk ke Arab Saudi untuk tujuan *tourism* ini (CNN, 2019).

Sebelum dibukanya pembuatan visa dengan tujuan wisata, kelonggaran peraturan ini mulai menjadi perbincangan kembali ketika diperbolehkannya acara konser yang tidak memisahkan *gender*. Hal ini telah terealisasi salah satunya dalam konser *boyband* (BTS) yang berasal dari Korea Selatan yang secara resmi diundang oleh Pangeran Mohammed bin Salman untuk mengadakan konser pada Stadium Internasional King Fahd dengan tiket terjual habis sebanyak 60.000 tiket (BBC, 2019).

Beberapa masyarakat yang menonton konser ini membagikan cerita bagaimana Riyadh konser ini dengan sangat megah. Salah satunya seperti beberapa bangunan dan *landmarks* yang diberikan pantulan cahaya berwarna ungu (warna khas dari BTS) satu hari sebelum kedatangan BTS ke Arab Saudi. Hal ini

merupakan salah satu tren yang ada di London, dimana bangunan-bangunan di tengah kota akan ‘menyala’ dengan warna-warna tertentu untuk menyambut atau merayakan sesuatu.

Tidak sedikit pria yang datang untuk menghadiri konser ini, dengan rasio hampir sama dengan jumlah wanita yang menghadiri konser tersebut. Pada konser itu, pintu masuk maupun tempat duduk di dalam stadium tersebut tidak dibedakan antara pria dan wanita. Peraturan yang diberikan kepada penonton pun termasuk standar seperti konser-konser pada umumnya dan tidak ada aturan ketat dalam hal-hal tertentu, mengingat lokasi konser tersebut berada di negara Islam. Dan tidak sedikit pula penonton yang datang dari luar negeri. Adanya kunjungan masyarakat asing untuk menghadiri konser musik tersebut dan setelahnya juga merupakan salah satu perubahan di Arab Saudi, dimana kunjungan sejumlah masyarakat asing tersebut tidak hanya untuk wisata rohani tetapi untuk melakukan ‘liburan’ di Arab Saudi.

Respons positif dari masyarakat luar terhadap kebijakan-kebijakan baru ini membuat kunjungan masyarakat asing ke Arab Saudi meningkat drastis, sehingga Pangeran Mohammed bin Salman merasa bahwa salah satu tujuannya dalam Saudi Vision 2030 untuk meningkatkan perekonomian dengan cara yang ‘baru’ merupakan hal yang memang dibutuhkan Arab Saudi yang harus lepas ketergantungan dari penjualan minyak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang salah satunya dilakukan oleh Mohammed S. Al Surf dan Lobna A. Mostafa (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Will the Saudi’s 2030 Vision Raise the Public Awareness of Sustainable Practices?*”, dijelaskan terkait hubungan antara pelaksanaan Saudi Vision 2030 ini dengan masyarakat Arab Saudi sendiri. Untuk memenuhi penelitiannya, dilakukan *survey* terkait *public awareness* yang meningkat setelah adanya Saudi Vision 2030 ini kepada masyarakat sekitar. Sedangkan penelitian serupa juga dilakukan oleh Mohammad Nurrunabi (2017), dimana ia menjelaskan *shifting* Arab Saudi yang sebelumnya mengandalkan perdagangan minyak untuk perekonomian negaranya, menjadi *knowledge-based economy*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba

menjelaskan Saudi Vision 2030 dengan menggunakan konsep liberalisasi dan lebih berfokus pada pemerintahan serta Pangeran Mohammed bin Salman sendiri dan bukan pada masyarakatnya. Penelitian ini juga mengaitkan perubahan perekonomian Arab Saudi dengan adanya pelaksanaan Saudi Vision 2030.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu “mengapa Pangeran Mohammed bin Salman ingin mencapai poin *a thriving economy* dalam Saudi Vision 2030 dengan menggunakan strategi liberalisasi ekonomi negara?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan rencana Pangeran Mohammed bin Salman dalam pelaksanaan liberalisasi Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan hubungan internasional khususnya dalam konsep liberalisasi yang digunakan dalam strategi politik Pangeran Mohammed bin Salman pada Saudi Vision 2030 di Arab Saudi. Serta, penulis berharap penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana politik di Arab Saudi sebelum dan setelah Pangeran Mohammed bin Salman mendapatkan wewenang untuk mengambil keputusan terkait negara tersebut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan penggunaan konsep liberalisasi dari suatu negara serta pentingnya membangun hubungan dengan negara lain dalam bekerjasama untuk membantu pemenuhan kepentingan nasional negara masing-masing.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Teori Liberalisme**

Teori liberalisme atau liberal ini merupakan salah satu teori Hubungan Internasional. John Locke yang merupakan pencetus pemikiran ini pertama kali mengatakan bahwa manusia itu terlahir setara dan kebebasan merupakan nilai dasar dari liberalisme. Locke juga mencetuskan konsep hak asasi manusia, dimana tiap-tiap individu terlahir dengan hak asasi manusia yang memperbolehkan individu untuk bebas dan setara. Selain Locke, Adam Smith juga salah satu tokoh liberal yang mengedepankan kebebasan individu dan mengurangi campur tangan pemerintah. Ia yakin bahwa pasar akan meluas secara spontan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Menurutnya kepentingan pribadi merupakan kekuatan dalam pengendalian perekonomian suatu negara. Smith juga menciptakan teori '*the invisible hand*' yang menyatakan bahwa sebenarnya negara tidak perlu ikut campur tangan dalam perekonomian. Sehingga individu yang mengejar kepentingannya masing-masing justru akan memajukan masyarakat dengan sendirinya (Dahar, 2012).

Pandangan liberalisme juga menganggap sifat manusia pada dasarnya rasional. Sehingga, negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional melainkan terdapat aktor-aktor non negara yang juga berpengaruh. Jackson dan Sorensen juga mengemukakan pendapat mereka terkait mengenai teori liberalisme dan mengatakan bahwa terdapat tiga asumsi dasar; pertama liberalisme memandang positif seorang individu, kedua liberalisme meyakini bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif dan tidak konfliktual, dan ketiga liberalisme percaya akan kemajuan (Jackson dan Sorensen, 2009). Selain itu, sistem dasar internasional adalah anarki yang didukung oleh aturan dan hukum internasional. Maka dari itu, sifat dasar

interaksi antar negara yang lebih kompetitif dapat mengakibatkan konflik tetapi dapat juga menciptakan kerjasama dalam bidang ekonomi (Perwita & Yani, 2006).

### **1.5.2 Konsep Liberalisasi Ekonomi**

Kata '*to liberalize*' atau untuk meliberalisasi ini sendiri memiliki arti menghilangkan atau melonggarkan batasan yang biasanya digunakan dalam pembahasan mengenai perekonomian atau sistem politik. Sehingga liberalisasi mengacu pada penghapusan dan pelanggaran kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan politik ataupun perekonomian suatu negara. Konsep Liberalisasi ini salah satunya dijelaskan oleh Lorin Reynolds dalam penelitiannya mengenai konsep liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi. Ia mengartikan liberalisasi sebagai penghapusan kontrol negara pada kegiatan di sektor ekonomi sehingga tidak ada interferensi negara. Ia menganggap, sektor-sektor ekonomi dalam suatu negara pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus diatur oleh negara (Reynolds, 2017).

Liberalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang mempromosikan perdagangan bebas, deregulasi, dan *downsizing* atau privatisasi layanan publik, serta penghapusan subsidi, pengendalian harga, dan sistem penjatahan (Woodward, 1992). Maka dari itu, liberalisasi ekonomi ini menganggap intervensi pemerintah dalam perekonomian negara merupakan hal yang tidak efisien dan harus dibatasi. Dikatakan bahwa negara mungkin akan bertindak dengan perspektif *self-interest*, sehingga pada akhirnya akan menggunakan *power* dan otoritas mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun negara memiliki tujuan yang baik, tetapi tetap saja negara diasumsikan tidak berkompeten dalam mengatur perekonomian sepenuhnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2003).

Konsep Liberalisasi, khususnya pada bidang perekonomian, telah banyak digunakan oleh negara-negara maju karena pada dasarnya kebijakan mereka tidak memiliki banyak peraturan. Di negara berkembang, konsep liberalisasi ini pertama kali dilaksan akan di India ketika pemerintahan negara tersebut mengadopsi *the New Economic Policy* pada tahun 1991 yang salah satunya menggunakan

liberalisasi sebagai respon atas krisis ekonomi yang mereka hadapi saat itu (Dewi, 2007). Bagi negara berkembang, liberalisasi dapat membuka batasan ekonomi negara mereka kepada investor dan perusahaan asing. Liberalisasi ini kemudian memberi beberapa perubahan pada kebijakan di India seperti; menyederhanakan kebijakan, regulasi, dan perpajakan, memberikan dorongan untuk melakukan ekspor dan memperbolehkan lebih banyak impor, sampai restrukturisasi sektor publik agar lebih efisien. Kemajuan perekonomian India yang cukup pesat dapat dibuktikan dalam sebuah jurnal yang mengatakan bahwa “secara keseluruhan, tidak ada keraguan bahwa reformasi dilaksanakan sejak tahun 1991 telah menyebabkan kemajuan ekonomi yang cukup besar di India. Sebagai contoh, dari 1992-1993 melalui tahun 2000-2001, pertumbuhan ekonomi rata-rata belum pernah terjadi sebelumnya 6,3 persen per tahun” (Acharya, 2001). Sampai saat ini konsep liberalisasi ini digunakan tidak hanya oleh negara berkembang tetapi negara-negara lain yang memang ingin melakukan perubahan terhadap peraturan negaranya yang cukup ketat. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Britania Raya, juga mendukung adanya liberalisasi ekonomi ini dengan mengatakan bahwa dalam perekonomian global pada saat ini, “*success will go to those companies and countries which are swift to adapt, slow to complain, open and willing to change. The task of modern governments is to ensure that our countries can rise to this challenge*” dan dengan adanya globalisasi yang tidak dapat ‘berhenti’ ini negara harus dapat mengikuti perkembangan dunia global (Newsweek, 2005).

## **1.6 Definisi Konseptual**

### **1.6.1 A Thriving Economy**

*A thriving economy* merupakan satu dari tiga fokus utama dalam pencapaian target Saudi Vision 2030. Poin ini berfokus pada pengembangan perekonomian di Arab Saudi yang diharapkan dapat lepas dari ketergantungan pemasukan yang saat ini sebagian besarnya didapatkan dari perdagangan minyak. Salah satu strategi dalam pencapaian poin ini adalah dengan diberikannya peluang investasi bagi negara asing, dimana Arab Saudi akan memaksimalkan perekonomian mereka dan membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan besar asing dalam



sektor-sektor tertentu. Selain itu, Arab Saudi juga akan mengembangkan sektor pariwisata yang dapat menarik wisatawan, terutama wisatawan asing, yang telah didukung dengan dibukanya pembuatan visa dengan tujuan wisata untuk masuk ke Arab Saudi.

## **1.7 Definisi Operasional**

### **1.7.1 Konsep Liberalisasi**

Adanya konsep liberalisasi ini dapat digunakan untuk menganalisa. Penelitian ini melihat sikap dan keputusan Pangeran Mohammed bin Salman dalam menciptakan Saudi Vision 2030 dengan menggunakan aspek yang terdapat dalam konsep liberalisasi ekonomi yaitu menghilangkan atau melonggarkan batasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan politik ataupun perekonomian dalam Arab Saudi.

### **1.7.2 A Thriving Economy**

A thriving economy sendiri memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai Arab Saudi dalam pelaksanaan Saudi Vision 2030. Penelitian ini akan melihat perkembangan Arab Saudi setelah diterapkannya Saudi Vision 2030 dalam 3 tujuan yang akan dicapai (Vision 2030 n.d.):

- a. *A thriving economy rewarding opportunities*, terkait angka pengangguran, kontribusi SME, dan partisipasi perempuan;
- b. *A thriving economy investing for the long-term*, terkait target peringkat negara dalam perekonomian terbesar, sektor minyak dan gas, dan Dana Investasi Publik;
- c. *A thriving economy open for business*, terkait peningkatan investasi asing dan kontribusi sektor wisata.

## **1.8 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa upaya dari Pangeran Mohammed bin

Salman untuk mencapai poin *a thriving economy* dengan menentang batasan-batasan Arab Saudi dan meliberalisasi negara tersebut bertujuan untuk memperkuat perekonomian Arab Saudi agar tidak bergantung pada perdagangan minyak yang tidak dapat diprediksi, serta menaikkan nama Arab Saudi di dunia global yang sebelumnya belum dilaksanakan di Arab Saudi. Liberalisasi ini salah satunya dilakukan dengan menciptakan kerjasama antara negaranya dengan negara-negara lain, terutama negara barat.

## **1.9 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut salah satu ahli, metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. (Sugiyono, 2005). Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data secara lengkap terkait topik pembahasan penelitian ini dan menyusun kembali data tersebut menjadi sebuah data deskriptif.

### **1.9.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan melalui studi literatur untuk mendapatkan data-data yang relevan dan dapat diakses secara *online*, terutama mengenai Saudi Vision 2030 yang memberikan informasi terkait proyek tersebut pada website resmi mereka. Selain itu, jurnal, berita, dan artikel terkait yang dapat diakses secara *online* juga digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.